

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

KECAMATAN TEMPURSARI



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPURSARI

Jl. Raya Tempursari No. 06 Telp. /Fax. (0334) 590045

kec_Tempursari@lumajangkab.go.id

TEMPURSARI – 67375

POKIN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Tempursari yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tempursari Tahun 2024 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Tempursari Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2025

CAMAT TEMPURSARI



ARIF MUSTOFA,SAP

NIP 19750712 199703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.3. Gambaran Umum	3
1.3.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah	3
1.3.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	3
1.4. Isu Strategis.....	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah	
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	4
2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	4
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	4
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.1.1. Pengukuran Kinerja	31
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	40
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..	3
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	3
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional	3
3.1.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	3
3.1.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	3
3.1.2.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	3
3.3. Realisasi Anggaran.....	3
3.3.1. Capaian Kinerja Lain.....	3
3.3.2. Inovasi.....	3
BAB IV. PENUTUP	46
DAFTAR TABEL	

TABEL 1	
Tabel Komposisi Pegawai	10
TABEL 2	
Jumlah ASN Kecamatan Tempursari berdasarkan jenis kelamin Pertahun 2024	10
TABEL 3	
Jumlah SDM Kecamatan Tempursari berdasarkan Tingkat Pendidikan Pertahun 2024	11
TABEL 4	
Jumlah ASN Kecamatan Tempursari berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Latihan Perjenjangan Pertahun 2024....	11
TABEL 5	
Data pegawai kecamatan tempursari Tahun 2024.....	12
TABEL 6	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024.....	13
TABEL 7	
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	17
TABEL 8	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempursari.....	19
TABEL 9	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempursari.....	20
TABEL 10	
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Tempursari Tahun 2024.....	21
TABEL 11	
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU.....	23
TABEL 12	
Tabel Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	35
TABEL 13	
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024.....	36
TABEL 14	
Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Tempursari	44
TABEL 15	
Tabel Target dan Realisasi.....	52
TABEL 16	
Tabel Indikator Kinerja.....	56
TABEL 17	
Tabel Realisasi Kinerja	66

TABEL 18	
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.	67
TABEL 19	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
TABEL 20	
Tabel Realisasi Anggaran 2024.....	76
TABEL 21	
Tabel Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Kecamatan Tempursari	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Tempursari	2
Gambar 2	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ke Tahun	66

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Tempursari menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tempursari, Kecamatan Tempursari merupakan unsur

penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pelayanan Publik. yang dipimpin oleh Camat Tempursari yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Tempursari terdiri atas :

1. CAMAT
2. SEKRETARIS KECAMATAN
Sekretariat Camat membawahi :
 - a. SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
 - b. SUB BAGIAN KEUANGAN
3. KASI PEMERINTAHAN
4. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5. KASI PELAYANAN UMUM

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Tempursari adalah sebagaimana berikut

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEMPURSARI
KABUPATEN LUMAJANG
Tahun 2024**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No. 96 Tahun 2019



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Tempursari menyelenggarakan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan, maka Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tempursari

1. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Tempursari mengacu pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, maka Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

- menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris

Sekretariat (Sekretaris Camat) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan
2. Menghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan
3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan
4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
5. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan
6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian
2. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain – lain)
5. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan
6. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan
7. Melakukan administrasi kepegawaian
8. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
9. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU)
10. Melakukan administrasi barang milik daerah
11. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
12. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran
3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/ renja, LAKIP, pengukuran Indeks kepuasan masyarakat)
5. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban

6. Melakukan penyusunan laporan keuangan
7. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketertarikan dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundangan-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;

3. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
6. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
8. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
9. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
10. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
11. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat dan;
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum
3. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum,

pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK

4. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
5. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
6. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Tempursari didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 15 orang (kondisi per 1 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.	
		L	P	PN S	P3 K	TK B	SD	SMP	SM A	D 3	S 1	S 2	S 3	2	3		4
1.	Camat	1		1							1					1	
2.	Sekretaris																Meninggal
3.	Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian																Purna tugas
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1		1							1					1	
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1							1					1	
6.	Kepala Seksi PMD		1	1							1					1	

7.	Kepala Seksi Pelayanan		1	1					1								1	
8.	Staf Pemerintahan	1		1					1									
9.	Staf PMD	1	1	2					1		1							
9.	Tenaga Kontrak	6	1			7				2	5							
Jumlah		11	4	8		7			3	2	10						1	4

Kecamatan Tempursari dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu Sekretaris Kecamatan dengan 2 Kepala Sub Bagian, dan 3 Kepala Seksi serta staf ASN dan PTT. Selanjutnya perkembangan sumber daya Kecamatan Tempursari diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah ASN Kecamatan Tempursari berdasarkan jenis kelamin
Pertahun 2024

No	Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1.	Pegawai ASN	5	3
2.	Pegawai Tidak Tetap	6	1
	Jumlah	11	4

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Tempursari berjumlah 15 orang antara lain 11 orang adalah laki-laki dan 4 orang adalah perempuan.

Tabel 3
Jumlah SDM Kecamatan Tempursari berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pertahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
3	Sekolah Menengah Umum (SMU)	5
4	Sarjana Muda/D3	1
5	Sarjana	8
6	Pasca Sarjana	1
	Jumlah	15

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan aparatur Kecamatan Tempursari antara lain tingkat SMU berjumlah 5 orang, Sarjana Muda/D3 berjumlah 1 orang, Sarjana (S1) berjumlah 8 orang dan Paska Sarjana berjumlah 1 orang.

Tabel 4

Jumlah ASN Kecamatan Tempursari berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Latihan Perjenjangan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan Perjenjangan	Jumlah
1	Diklatpim Tk. IV	3
2	Diklatpim Tk. III	2
	Jumlah	5

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa 3 orang ASN telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV dan 2 orang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan tersebut diberikan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel 1.1.3 di atas, total pegawai Kecamatan Tempursari per 31 Desember 2024 sebanyak 15 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 5 orang, pejabat fungsional sebanyak 0 orang, pejabat pelaksana sebanyak 3 orang, pejabat PNS sebanyak 8 orang, PPPK sebanyak 0 orang dan

tenaga kontrak sebanyak 7 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 73 % : 27 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 4 orang.

Tabel : 5
DATA PEGAWAI KECAMATAN TEMPURSARI
TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1	ARIF MUSTOFA, SAP NIP. 19750712 199703 1 001	L	Penata Tk. I (III/d)	Camat	S.1
2	PAWESTRI NIP. 19720409 199602 2 001	P	Penata Tk.I (III/d)	Pj. SEKCAM KASI PELAYANAN UMUM	SMA
3	SRI NARIYATI NIP. 19780509 199809 2 001	P	Penata (III/c)	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	SMA
4	BENY SURYO S, S.Sos NIP. 19800506 200909 1 001	L	Penata (III/c)	KASI PEMERINTAHAN	S.1
5	EKO WIDIANTO, S.Pd.SD NIP. 197803252014061 1 001	L	Penata(III/c)	- KASUBAG KEUANGAN - Pj.KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
6	SITI MUTMAINAH NIP. 19670304 200701 2 028	P	Penata Muda (III/a)	PENGADMINISTRASIAN UMAM pada SEKSI PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	S.1
7	Mulyadi NIP. 19740415 200901 1 004	L	Pengatur Tk.I (II/d)	PENGADMINISTRASIAN UMUM pada SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	SMA
8	AGUS TRIYONO NIP. 19720815 200701 1 017	L	Pengatur Muda (II/a)	PENGADMINISTRASIAN UMUM pada SEKSI PEMERINTAHAN	SMA
9	AAN TRIADMOKO NIP. -	L	-	Pengelola Program dan Kegiatan	S.1
10	ABRORI HAMIM NIP. -	L	-	Pengadministrasi persuratan	S.1
11	FEBRIANTO NUGROHO NIP. -	L	-	Pengadministrasi umum	SMA
12	MURI HIDAYAT NIP.-	L	-	Pengadministrasi Keuangan	S.2
13	WAFIYATUL MASLAKHAH NIP. -	P	-	Pengadministrasi Umum	SMA
14	PANDRI AHMAD NIP. -	L	-	Peramu Kebersihan	SMA
15	DIMAS SULUH	L	-	Pengemudi	SMA

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tempursari selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Tempursari disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 6
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1	Portable Generating Set	1	Unit	Baik
2	Generating Set	1	Unit	Baik
3	Station Wagon	1	Unit	Kurang Baik
4	Sepeda Motor	7	Unit	Baik
5	Perkakas Pengukur (Meteran Roda)	1	Unit	Baik
6	Peralatan Studio Visual	1	Unit	Baik
7	Proyektor Attachment	2	Unit	Rusak
8	LCD Proyektor	3	Unit	1 Baik 2 Rusak
9	Megaphone	1	Unit	Baik
10	Unit Power Suply	6	Unit	Baik
11	UPS	3	Unit	Baik
12	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	Unit	Rusak
13	Lemari Besi/Metal	6	Unit	Baik
14	Filling Cabinet	10	Unit	Baik
15	Rak Besi/Metal	1	Unit	Baik
16	Filling Besi/Metal	2	Unit	Baik
17	Filling Kayu	1	Unit	Baik
18	Sofa Rumah Dinas	3	Set	1 Set Rusak 2 Set Baik
19	Sofa Ruang Camat	1	Unit	Baik
20	Band Kas	1	Unit	Baik
21	Lemari Makan	1	Unit	Baik
22	Lemari Es	1	Unit	Baik
23	Alat Kantor Lainnya Backdrop	1	Unit	Baik
24	Lain Lain Alat Kantor (Finger Print)	1	Unit	Rusak
25	Papan Visuil	2	Unit	Baik
26	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	Baik
27	CCTV Set	1	Set	Rusak

28	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	4	Set	Baik
29	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	2	Set	Baik
30	Tempat Tidur	1	Set	Baik
31	Meja Rapat	6	Unit	Baik
32	Meja Podium	1	Unit	Baik
33	Meja Resepsion	3	Unit	Baik
34	Kursi Rapat	22	Unit	Baik
35	Bangku Tunggu	7	Unit	Baik
36	Lemari Pakaian	3	Unit	Baik
37	Teralis Besi	3	Unit	Baik
38	Karpet	5	Unit	Baik
39	Mesin Potong Rumput	3	Unit	1 Unit Baik, 2 Unit Rusak
40	Tempat Sampah Besar	6	Unit	Rusak
41	Lemari Es	1	Unit	Baik
42	AC Unit	2	Unit	1 Set Baik , 1 Set Rusak
43	Kipas Angin	3	Unit	Rusak
44	Vacum Cleaner	1	Set	Baik
45	Dispenser Tabung Bawah	1	Unit	Baik
46	Mesin Cuci	1	Unit	Baik
47	Alat dapur lainnya (Kitchen Set)	1	Unit	Baik
48	Televisi	5	Unit	1 Unit Baik, 4 Unit Rusak
49	Loudpeaker	2	Unit	Baik
50	Sound System	3	Unit	Baik
51	Microphone	1	Unit	Baik
52	Stavolt/Stabilizer	2	Unit	Baik
53	Camera Film	1	Unit	Rusak
54	Lambang Garuda Pancasila	2	Unit	Sedang
55	Tiang Bendera	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak
56	Tangga Aluminium	1	Unit	Sedang
57	Tabung Semprot	1	Unit	Rusak
58	Alat Pemadam/Portable	2	Unit	Baik
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit	Baik
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit	Baik
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit	Rusak Sedang
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit	Rusak Sedang
63	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	Baik
64	Facsimile	2	Unit	Rusak
65	Handy Talkie (HT)	2	Unit	Rusak
66	Back-Up : UPS	1	Unit	Baik
67	PC Unit	12	Unit	5 Baik, 7 Rusak
68	Komputer PC	3	Unit	Baik
69	Lap Top	4	Unit	4 Baik, 1Rusak Ringan, 1 Rusak
70	Monitor	1	Unit	Rusak
71	Printer	17	Unit	6 Baik, 11 Rusak
72	Printer LQ	1	Unit	Rusak
73	Printer A3	1	Unit	Rusak

74	Scaner	1	Unit	Rusak
75	Scaner A3	1	Unit	Baik
76	Peralatan Jaringan	1	Unit	Rusak

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Tempursari di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Tempursari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1.2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Tempursari berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Tempursari dapat di identifikasikan.

1.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tempursari

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan melakukan analisis eksternal dan internal didahului dengan pengidentifikasian kekuatan / strenghts (S), kelemahan / weaknessess (W), peluang / opportunities (O) dan ancaman / threats (T) yang dimiliki Kecamatan Tempursari berkaitan dengan perwujudan visi yang ditetapkan.

Kondisi internal terdiri dari kekuatan / strenghts (S) dan kelemahan / weaknees (W) yang dimiliki Kecamatan Tempursari Lumajang. Pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan/Strenghts (S)

1. Kuantitas Sumberdaya Manusia yang mencukupi untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
2. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
3. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.
4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.

b. Kelemahan/Weakness (W)

1. Belum sesuai kualitas SDM dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan dana, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas - tugas.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan Perangkat Desa dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan desa.

Kondisi eksternal terdiri dari peluang / opportunities (O) dan ancaman / threats (T) yang di hadapi oleh Kecamatan Tempursari. Pengidentifikasian peluang dan ancaman yang dihadapi oleh kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

c. Peluang/Opportunities (O)

1. Dilakukannya reuiu RPD serta ketentuan lainnya sebagai pedoman reuiu Renstra OPD.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan.
3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai melalui pendidikan formal dan informal (kursus / pelatihan)

d. Ancaman/Threats (T)

1. Koordinasi penyelenggaraan program - program pembangunan masing - masing instansi di Kecamatan yang belum optimal.

2. Terbatasnya kewenangan Camat dibandingkan dengan tugas - tugas yang harus ditangani di wilayah kecamatan.
3. Perkembangan pembangunan yang semakin cepat.

Berdasarkan faktor - faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi disusun strategi. Strategi adalah pemikiran - pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi sesuai dengan faktor lingkungan internal dan eksternal. Strategi - strategi yang disusun berdasarkan analisis SWOT menggunakan pendekatan - pendekatan sebagai berikut

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (S+O)
- b. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada / tersedia (W+O)
- c. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi kelemahan (S+T)
- d. Mengurangi kelemahan untuk mencegah / mengatasi ancaman (W+T)

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Lumajang didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penentuan Isu isu Strategis, tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurangnya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik 2. Kurangnya publikasi terkait prosedur/ alur pelayanan di Kecamatan 3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

		<p>Kecamatan</p> <p>4. Kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public</p>
--	--	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Tempursari disajikan pada Tabel 7

Tabel 8
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempursari

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Hasil Penghitungan indeks pelayanan publik kabupaten	DAU
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100$	DAU
2		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	DAU

				<i>Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa</i>	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, serta dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tempursari sehingga terjadi penyesuaian penjenjangan kinerja dan perubahan strategi guna mendukung kinerja Kepala Daerah dalam bentuk perubahan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/305/427.12/2024 tentang Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang dimaksud, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Tempursari disajikan pada Tabel 7

Tabel 9
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempursari

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Hasil Penghitungan indeks pelayanan publik kabupaten	DAU
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		<i>Jumlah hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti</i> $\frac{\text{_____}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100$	DAU
2		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		<i>Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu</i> <i>+ Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu</i> $\frac{\text{_____}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen}}$	DAU

				<i>administrasi</i>	
				<i>pemerintahan desa</i>	

1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Tempursari adalah

Tabel 10

Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Tempursari Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	94.12	77.27
2		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	85.71	65,00

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,637,711,042	1,434,601,672
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,320,000	1,200,000
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136,009,700	33,834,900
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13,100,000	2,700,000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,200,000	7,200,000
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13,699,800	3,150,000
	Jumlah	1,818,040,542	1,482,686,572

1.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Kecamatan Tempursari tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU
Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SUB Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Targ et	Anggaran
1	2	3	8	9	13	14
				1,727,477,304		1,482,686,572
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	1,531,647,404	100%	1,434,601,672
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	11,800,000	100%	4,051,400
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2,000,000	2 Doku men	1,397,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,240,000	0 Doku men	-

7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	0 Dokumen	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan La	5 Laporan	2,000,000	5 Laporan	1,266,600
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3,060,000	8 Laporan	1,387,800
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,078,751,004	100%	1,130,482,296
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/12 Bulan	1,053,079,004	9 Orang/12 Bulan	1,111,670,396
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	15,972,000	12 Dokumen	18,072,000
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3,000,000	0 Dokumen	-

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,500,000	1 Laporan	739,900
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1,000,000	0 Dokumen	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/smesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1,200,000	0 Laporan	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Aministrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	2,500,000	0%	-
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	750,000	0 Dokumen	-
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	750,000	0 Laporan	-

7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,000,000	0 Laporan	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	96,958,200	100%	85,016,126
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,290,200	1 Paket	1,250,637
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25,000,000	4 Paket	24,988,958
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	2 Paket	4,597,531
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	1,200,000	2 Paket	1,189,000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7,500,000	12 Laporan	4,320,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54,968,000	12 Laporan	48,670,000

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD	100%	99,000,000	0%	-
7.01.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	55,000,000		-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	44,000,000		-
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	201,322,400	100%	191,245,900
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,700,000	12 Laporan	1,700,000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28,320,000	12 Laporan	30,000,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	171,302,400	12 Laporan	159,545,900
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	41,315,800	100%	23,805,950

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	33,865,800	8 Unit	19,005,950
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7,450,000	7 Unit	4,800,000
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	10,320,000	100%	1,200,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100%	6,000,000	0%	-
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	6,000,000	0 Dokumen	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100	4,320,000	100	1,200,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	4,320,000	1 Laporan	1,200,000

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	151,509,900	100%	33,834,900
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	119,399,900	100%	19,524,900
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 'Lembaga Kemasyarakatan	525,000	0 'Lembaga Kemasyarakatan	-
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	6,549,900	1 Dokumen	6,249,900
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	112,325,000	2 Laporan	13,275,000
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	32,110,000	100%	14,310,000

7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	150 Keluarga	21,825,000	150 Keluarga	14,310,000
7.01.03.2.06.0004	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	140 Keluarga	6,400,000	0 Keluarga	-
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1,575,000	0 Keluarga	-
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi		1,260,000	0 Keluarga	-

7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		1,050,000	0 Keluarga	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	13,100,000	100%	2,700,000
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitasi	13,100,000	1 Fasilitasi	2,700,000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 Laporan	7,700,000	1 Laporan	2,700,000
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5,400,000	0 Laporan	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7,200,000	100%	7,200,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitasi	7,200,000	1 Fasilitasi	7,200,000

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	7,200,000	12 Dokumen	7,200,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	13,700,000	100%	3,150,000
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	57.14		100%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%		100%	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	3,990,000	0 Dokumen	-
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	3,150,000		3,150,000
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	2,925,000		-

7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1,260,000		-
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	2,375,000		-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 12
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Tempursari adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	94 %	19,61 %	49%	19%	9%	98,04%	104%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	86 %	33,33 %	33%	14%	14%	95,24%	111%
3	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	74,%	58%	66%	58%	100%	100%
4	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	100%	0%			100%	100%
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	29%
6	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					5 Dokumen	33%
7	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen					8	33%

8	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan La	5 Laporan	5 Laporan					-	-
9	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	8 laporan					-	-
10	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	33%	40%	33,%	33%	100%	100%	
11	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/12 bulan	10 Orang/12 bulan	10 Orang/12 bulan	10 Orang/12 bulan	9 Orang/12 bulan	10 Orang/12 bulan	83%	
12	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	33%	
13	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen							
14	Tersediaanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan			1 Laporan	33%	
15	Tersedianya Dokumen penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen						-	-
17	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan						-	-

18	Tepenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	0%				100%	100%
19	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen					-	-
20	Terselesaikannya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan					-	-
21	Terselesaikannya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan					-	-
22	Terpenuhi administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	80%	70%	100%	60%	100%	100%
23	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	33%
24	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	33%
25	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	4 Paket			2 Paket	17%
26	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket		2 Paket	2 Paket	33%
27	Terselesaikannya Fasilitas Tamu yang disusun	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	33%
28	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	33%
29	Terpenuhi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan BMD	100%	0%				-	-

30	Tersedianya Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit					-	-
31	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit					-	-
32	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	33%
34	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	33%
34	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	33%
35	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	66%	83, %	100%	100%	100%	100%
36	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 37Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	33%
37	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit			4 unit	4 unit	11 Unit	33%
38	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	0%			100%	100%	100%
39	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100%	0%				-	-

40	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen					3 Dokumen	33%
41	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%				100%	100	100%
42	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	33%
43	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	4%	50%	75%	75%	100%	100%
44	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	50,%		50%	50%	100%	100%
45	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan					1 Lembaga Kemasyarakatan	33%
46	Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				7	33%
47	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan			2 laporan	5 laporan	-	-

48	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%		100%	100%	100%	100%	100%
49	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	150 Keluarga		60 Keluarga	60 Keluarga	50 Keluarga	150 Keluarga	33%
50	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	140 Keluarga					-	-
51	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	130 keluarga					-	-
52	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	28 Keluarga					-	-

53	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	70 Keluarga						-	-
54	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%					100%	100%	100%
55	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Fasilitas					1 Fasilitas		17%
56	Terlaksananya Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	33%
57	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan						-	-
58	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
59	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas		33%
60	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	33%

61	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	57%	0%	0%	0%	0%	100%	175%
62		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
63		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
64	Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	19,05 %	19,05%	90,48%	100 %	229%	229%
65	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen					-	-
66	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	33%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 1 dengan capaian kinerja 100 %

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi \geq 100% sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

Tabel 14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Tempursari

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	94 %	98,04%	104%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	86 %	95,24%	111%
3	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100%	100%
4	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	100%	100%
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	29%
6	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5 Dokumen	33%
7	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8	33%

8	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan La	5 Laporan	-	-
9	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	-	-
10	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
11	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/12 bulan	10 Orang/12 bulan	83%
12	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	33%
13	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		
14	Tersediaanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	33%
15	Tersedianya Dokumen penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	-	-
17	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	-
18	Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang	Persentase Fasilitasi Administrasi	100%	100%	100%

	Milik Daerah	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			
19	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-
20	Terselesaikannya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	-
21	Terselesaikannya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	-
22	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
23	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33%
24	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	33%
25	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17%
26	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	2 Paket	33%
27	Terselesaikannya Fasilitasi Tamu yang disusun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	33%
28	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	33%
29	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan BMD	100%	-	-

30	Tersedianya Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	-	-
31	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	-	-
32	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
33	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	33%
34	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33%
34	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33%
35	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
36	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 37Perizinannya	8 Unit	8 Unit	33%
37	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	33%
38	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	100%	100%
39	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100%	-	-

	di Tingkat Kecamatan	pemerintahan di Kecamatan			
40	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	33%
41	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100	100%
42	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Dokumen	3 Dokumen	33%
43	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%
44	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	100%
45	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	33%
46	Terlaksananya sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	7	33%
47	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	-	-
48	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	100%	100%	100%

	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan			
49	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	150 Keluarga	150 Keluarga	33%
50	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	140 Keluarga	-	-
51	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	130 keluarga	-	-
52	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	28 Keluarga	-	-
53	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	70 Keluarga	-	-
54	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%

55	Terfasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Fasilitasi		17%
56	Terlaksananya Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	33%
57	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	-	-
58	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
59	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitasi		33%
60	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	33%
61	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	57%	100%	175%
62		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
63		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
64	Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	229%	229%

	LPPDes tepat waktu	Pengawasan Pemerintahan Desa			
65	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	-	-
66	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	33%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Tempursari tahun 2024 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100% (satunya) , terealisasi sebesar 100% (satunya) dengan capaian 100% % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 15

Target dan Realisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77,27	98,04	126,87	
2		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	65,00	95,25	146,53	
Capaian Rata-rata					136,7	

Penjelasan :

a. Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

1. JENIS FASILITASI

1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;
2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes;

3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes;
4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;
5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;
6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;
7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;
8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa;
9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;
10. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;
11. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;
12. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes
13. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;
14. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;
15. Fasilitasi pembinaan Administrasi Keuangan;
16. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;
17. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.
18. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)
19. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)
20. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa
21. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)
22. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)
23. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa
24. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa
25. Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades
26. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD
27. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;
28. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;
29. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam
30. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes
31. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan

32. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes
33. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan PerubahanRKPDes
34. Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
35. Pembinaan LINMAS
36. Pembinaan SKD
37. Monev Trantibum
38. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD
39. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;
40. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;
41. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif
42. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes yang partisipatif
43. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif;
44. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif
45. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif
46. Pembinaan BKAD
47. Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)
48. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;
49. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam
50. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes
51. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDes
52. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes
53. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes
54. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian
55. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik
56. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
57. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja
58. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
59. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan
60. Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

2. JENIS KOORDINASI

1. Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;
2. Koordinasi Pendampingan Desa

3. JENIS REKOMENDASI

1. Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Dengan rumus dibawah ini diperoleh hasil :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$$

63
_____ x 100 %
63
= 100 %

b. Indikator : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

❖ Sasaran Strategis 1 :

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti

yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 1 , terealisasi sebesar 1 dengan capaian 98.04 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 16

.Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Ket
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	98,04	

❖ **Sasaran Strategis 2 :**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 1 , terealisasi sebesar 1 dengan capaian 95.25 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah (sesuai kriteria predikat). Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 17
Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Ket
2	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	95,25	

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 17
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemenuhan fasilitaskebutuhan operasional perkantoran</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase fasilitasi dokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah</i>							3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>							1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>							1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>							1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>							2 Laporan	3 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	3 Laporan	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>							12 ASN/Bulan	12 ASN/Bulan	100 %	12 ASN/Bulan	12 ASN/Bulan	100 %	12 ASN/Bulan	12 ASN/Bulan	100 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>							12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>							12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>							6 Laporan	7 Laporan	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	6 Laporan	7 Laporan	100 %
	Pengelolaan dan penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>							1 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>							18 Laporan	19 Laporan	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>							1 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>							12 Laporan	13 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</i>							0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	90%	100 %
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>							-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan Fasilitas Administrasi Umum</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>							7 Paket	8 Paket	100 %	7 Paket	7 Paket	100 %	7 Paket	7 Paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>							35 paket	36 paket	100 %	35 Paket	35 Paket	100 %	35 Paket	35 Paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>							4 Paket	5 Paket	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>							12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>							12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang</i>							2 Paket	3 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100

		<i>Disediakan</i>								%			%			%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</i>							0%	0%	0%	89%	89%	100%	90%	90%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>							-	-	100%	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</i>							88%	88%	100%	89%	89%	100%	90%	90%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>							12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>							12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>							12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD</i>							88%	88%	100%	89%	89%	100%	90%	90%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>							8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>							4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>							-	-	100%	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
	Penataan Organisasi	<i>Persentase fasilitasi penataan organisasi</i>							0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>							-	-	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	1	100%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>							-	-	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	1	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat</i>							88%	88%	100%	89%	89%	100%	90%	90%	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa</i>							88%	88%	100%	89%	89%	100%	90%	90%	100%

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>						6 Lembaga Kemsyarakatan	6 Lembaga Kemsyarakatan	100 %	6 Lembaga Kemsyarakatan	6 Lembaga Kemsyarakatan	100 %	6 Lembaga Kemsyarakatan	6 Lembaga Kemsyarakatan	100 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>						7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>						12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	<i>persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan</i>						88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</i>						7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</i>						7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</i>						7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</i>						-	-	0%	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</i>						0%	0%	0%	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>						172 Keluarga	173 Keluarga	100 %	172 Keluarga	172 Keluarga	100 %	172 Keluarga	172 Keluarga	100 %
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan pangan Keluarga</i>						31 Keluarga	32 Keluarga	100 %	31 keluarga	31 keluarga	100 %	31 Keluarga	31 Keluarga	100 %

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>							46 Keluarga	47 Keluarga	100 %	46 Keluarga	46 keluarga	100 %	46 Keluarga	46 Keluarga	100 %
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>							375 Keluarga	376 Keluarga	100 %	375 keluarga	375 keluarga	100 %	375 Keluarga	375 Keluarga	100 %
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>							88%	188%	47 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>							1 Fasilitas	1 Fasilitas	100 %	1 fasilitas	1 fasilitas	100 %	1 Fasilitas	1 Fasilitas	100 %
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>							1 Laporan	1 laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>							88%	188%	47 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>							1 Fasilitas	1 Fasilitas	100 %	1 fasilitas	1 Fasilitas	100 %	1 Fasilitas	1 Fasilitas	100 %
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>							12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan</i>							88%	88%	100 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>							1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	-	-	0%	-	-	0%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase fasilitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>							88%	88%	100 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>							1 Laporan	1 laporan	100 %	-	-	0%	-	-	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>							6 Laporan	6 Laporan	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan</i>							7 Laporan	7 Laporan	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	7 laporan	7 laporan	100 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>							1 Dokumen	1 laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa yang menetapkan R KPDes Tepat</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
		<i>Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
		<i>Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu</i>							88%	88%	100 %	89%	89%	100 %	90%	90%	100 %
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	<i>Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu</i>							7 Desa	7 Desa	100 %	7 Desa	7 Desa	100 %	7 Desa	7 Desa	100 %
		<i>Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu</i>							7 Desa	7 Desa	100 %	7 Desa	7 Desa	100 %	7 Desa	7 Desa	100 %
		<i>Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu</i>							7 Desa	7 Desa	100 %	7 Desa	7 Desa	100 %	7 Desa	7 Desa	100 %
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>							3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>							12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

	Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>							3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>							-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

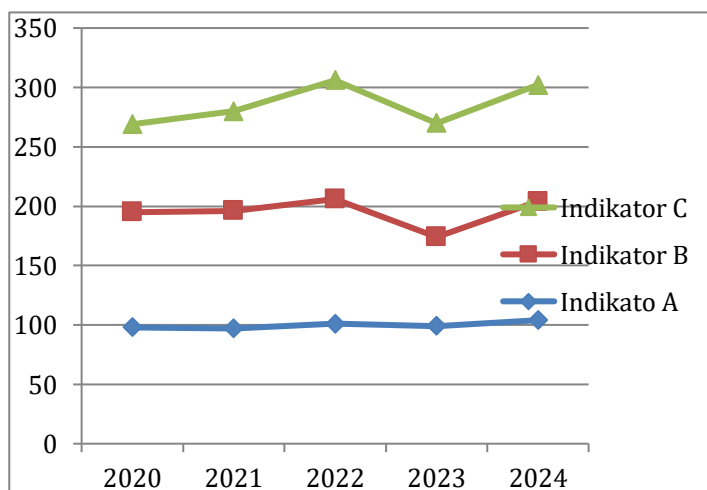
Tabel 17

Capaian Kinerja dari Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Keterangan
			T	R	C	
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77,27	100	129,41	
2		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	65,00	100	153,84	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Tempursari memiliki 2 tujuan dan 2 sasaran strategis. Sedangkan pada kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2024 hasil penyesuaian IKU, memiliki 2 tujuan dan 2 sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan / penurunan sebesar

Dari beberapa indikator yang sama dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan sbb:



Gambar 14

Grafik Capaian Indikator per Tahun

Dari grafik terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 terdapat kenaikan hal ini dikarenakan oleh adanya sedangkan dari tahun 2023 sampai 2024 ada penurunan hal ini dikarenakan .

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Nasional	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77,27 %	100 %		129,41 %
2		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	65,00 %	100 %		153,84%

Realisasi tujuan 100 % dengan indikator terdapat Kenaikan dari target awal renja 2024 pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan dalam sebesar atau diperbandingkan dengan kab/kota dengan karakteristik yang sama, capaiannya sebesar %.

3.1.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran KECAMATAN TEMPURSARI sebagian besar sudah memenuhi target / ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yaitu sebanyak xx%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

❖ Tujuan 1

Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tujuan 1 dengan indikator 1, capaian kinerja tahun ini sebesar 100 % tercapai , jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami

kenaikan sebesar 0,6 % dan jika dibandingkan dengan kota/dinas (yang menjadi benchmark) capainnya sebesar %, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Kegiatan Pelayanan Publik yang semakin meningkat
- b. Terjalin Sinergisitas yang semakin baik

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Masih Belum meratanya Informasi Pubik terutama pelayanan masyarakat (Akte kelahiran dan KTP)
- b. Perlu adanya program sinergisitas yang lebih memacu kegiatannya terutama dibidang Keamanan dan ketertiban masyarakat (Pembinaan Linmas),
- c. Multi agama ang di anut oleh masyarakat

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Inovasi di Bidang Pelayanan Publik dengan menginstensitaskan kediatan inovasi kecamatan (JEMPOL AMATIR)
- b. Melakukan Kegiatan Pembinaan Kantibmas secara rutin.
- c. Melaksanakan pembinaan agama dengan membentuk forum kerukunan antar agama.

❖ **Sasaran Strategis 1 :**

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran 1 Dengan indikator 1, capaian kinerja tahun ini sebesar 106 % tercapai jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan / penurunan sebesar 0,6 % dan jika dibandingkan dengan dengan kota/dinas (yang menjadi benchmark) capainnya sebesar %, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Layanan Jempolamatir yang berjalan lancar
- b. Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran, KK dan KTP yang lebih baik

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Program Jempolamatir sudah tidak relevan dikarenakan penganggaran dari program santunan kematian di pertengahan tahun 2023 sampai dengan 2024 tidak keluar (dihentikan)
- b. Terbatasnya Administrasi blangko dari Dispenduk terkadang terlambat

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Membuat Inovasi baru yang masih Dalam Proses Pemikiran

- b. Membuat surat permintaan blangko administrasi yang diperlukan secara intermedial berkala.

❖ **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran 1 dengan indikator 1 capaian kinerja tahun ini sebesar 117 % tidak dapat mencapai target 2024 dikarenakan adanya faktor penghambat dalam mencapai target tersebut yaitu Masih kurangnya sebagian pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan utamanya:

1. *menetapkan RKPD*
2. *menetapkan APBD*
3. *menetapkan LPP*

Meskipun demikian kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai target tahun 2024 tetapi realisasi tahun ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar 12 %. Hal ini tidak luput dari adanya faktor pendukung yaitu

1. Bapak Camat Selaku Pimpinan
2. Kasi Pemerintahan
3. Kepala Desa dari 7 Desa di kecamatan Tempursari
4. BPD dan LKMD

Meskipun demikian untuk kedepannya Kecamatan Tempursari akan tetap melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja diantaranya dengan selalu meningkatkan sinergisitas dengan lembaga-lembaga lainnya.

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Tempursari didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Tempursari dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	129 %	96 %	33%
2		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	154 %	100 %	54%

Pada Tabel 16 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** pada Kecamatan Tempursari tahun 2024 sebesar **Rp. 1,727,477,304,00** dan realisasinya sebesar Rp. 1,482,686,572,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100 %. Pada Tabel 8 ditunjukkan bahwa Kecamatan Tempursari dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 100 %, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** 1 dan 2 pada Kecamatan Tempursari tahun 2024 sebesar Rp. 1,727,477,304,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1,482,686,572,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100% . Pada Tabel 8 ditunjukkan bahwa Kecamatan Tempursari dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar .100. %, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Tempursari sebanyak 15 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 8 Orang , dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 75 %. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 7 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tidak tercapai , maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain tidak efisien *karena jika % kinerja < dari % pemenuhan pegawai, tidak efisien jika % kinerja < % pemenuhan pegawai.*

Dalam memenuhi kinerja yang kurang efisien dikarenakan kekurangan pegawai kami kecamatan tempursari membentuk TIM dalam memenuhi capaian kineja.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Tempursari yang ada saat ini dengan kondisi baik 65 % , rusak 20 % dan rusak berat 15 %. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2024 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya 65 % baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini tidak cukup efisien atau perlu dilakukan penambahan / pemenuhan dan pemeliharaan .

3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Tempursari ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan :

Indikator :, Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik memiliki 2 : sasaran stratetis pertama dengan target 94.12 % dan realisasi 100% sehingga capaiannya 106 %. Sasaran Strategis 2 dengan Target 85.71 % dan realiasai 100% sehingga capainyaan 117%. 2 (dua) Sasaran Strategis antara lain:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran ini diukur dengan indikator 2 ditunjang oleh 6 program yaitu:

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kinerja sasaran program 5 yang diukur dengan indikator 6 . Target untuk indikator ini adalah 5 dan realisasi 5 sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan 1 **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan kinerja sasaran kegiatan 1 yang diukur dengan indikator 1 dengan target 90 % dan realisasi 100 % sehingga capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena tepenuhinya pergram penuinjang urusan pemerintah daerah, sehinghan dari program, sasaran program serta indicator program dapat tercapai dengan baik, yang direalisasikan sesuai Triwulan Berjalan.

b. Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kinerja sasaran kegiatan 1 yang diukur dengan indikator 1 dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %.

Hal ini tercapai karena keuangan/gaji pegawai sebanyak Awal 10 Orang, sampai dengan 31 Desember 2024 pegawai tinggal 8 orang, dikarenakan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang sudah memasuki purna tugas.

c. Kegiatan 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sasaran kegiatan 1 yang diukur dengan indicator 1 dengan target 100 % dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena pengadministrasian umum perangkat daerah sesuai dengan target dan realisasinya, yang didukung dengan sub kegiatan.

d. Kegiatan 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sasaran kegiatan 1 yang diukur indikator 1 dengan target 100% realisasai 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sudah terpenuhi target, realisasai dan capaiannya.

e. Kegiatan 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sasaran kegiatan 1 yang diukur indicator 1 dengan target 100% dan realisasai 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dapat terealisasi dan tercapai sesuai target.

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK. dengan kinerja sasaran program 1 yang diukur dengan indikator 1 . Target untuk indikator ini adalah 1 dan realisasi 1 sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya Program yang diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan sasaran kegiatan 1 yang diukur indicator 1 dengan target 100% dan realisasai 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dapat terealisasi dan tercapai sesuai target.

- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN. dengan kinerja sasaran program 2 yang diukur dengan indikator 2. Target untuk indikator ini adalah 2 dan realisasi 2 sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya Program yang diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan sasaran kegiatan 3 yang diukur indicator 3 dengan target 100% dan realisasai 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kegiatan pemeberdayaan masyarakat desa sudah tercapai realisasai dan capaiannya sehingga target juga tercapai
 - b. Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Dengan sasaran kegiatan 3 yang diukur indicator 3 dengan target 100% dan realisasai 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena kegiatan pemebredayaan masyarakat desa sudah terpenuhi realisasai dan targetnya sehingga tercapai sesuai program.
- 4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. dengan kinerja sasaran program 1 yang diukur dengan indikator 1. Target untuk indikator ini adalah 1 dan realisasi 1 sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya Program yang diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan sasaran kegiatan 3 yang diukur indicator 3 dengan target 100% dan realisasai 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sudah terealisasi dan sudah tercapai sesuai target.
- 5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM. dengan kinerja sasaran program 1 yang diukur dengan indikator 1 Target untuk indikator ini adalah 1 dan realisasi 1 sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi

karena adanya Program yang diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan sasaran kegiatan 1 yang diukur indicator 1 dengan target 100% dan realisasai 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sudah sesuai dengan target dan realisasai sehingga kegiatan tersebut terpenuhi capainnya.

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA. dengan kinerja sasaran program 1 yang diukur dengan indikator 3. Target untuk indikator ini adalah 3 dan realisasi 3 sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya Program yang diwujudkan dalam pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan sasaran kegiatan 1 yang diukur indicator 3 dengan target 100% dan realisasai 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah sesuai dengan target dan realisasai sehingga kegiatan tersebut terpenuhi capainnya.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program yang menunjang sasaran strategis (1.Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan dan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa) mempunyai capaian kinerja yang baik maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

- **Sasaran str ategis dengan indicator kegiatan Ditunjang oleh 6 program yaitu:**
 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.
 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Tempursari tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.482.686.572,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.416.289.539,-, atau sebesar 95.52 %%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20
Realisasi Anggaran 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1,434,601,672.00	1,368,204,639.00	95.37%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33,834,900.00	33,834,900.00	100.00%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,150,000.00	3,150,000.00	100.00%
		1,482,686,572.00	1,416,289,539.00	95.52%

Catatan :

1. Realisasi anggaran yang digunakan adalah anggaran keseluruhan termasuk anggaran program penunjang

3.3. Capaian Kinerja Lain

Selain kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja diatas, Kecamatan Tempursari Tidak mempunyai kinerja lain.

Tabel 21
Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Kecamatan Tempursari

No	Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	Keterangan
		Nihil						

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 .target;
3. Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 .target;
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak target.

3.3.1. PENGHARGAAN

Selain itu pada Tahun 2024 ini Kecamatan Tempursari berhasil memperoleh beberapa penghargaan yaitu:

1. Penghargaan peserta peringkat 3 Musrenbang Kecamatan
2. -

3.3.2. INOVASI

Pada tahun 2024 Kecamatan Tempursari telah melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kinerja antara lain :

1. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang dan jasa dan pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik. dalam menyelenggarakan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan atas barang, jasa dan pelayanan administratif kepada setiap warga negara. Upaya pemerinatah dalam meningkatkan pelayanan publik yang tercantum pada Undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal p ayat (1) ditetapkan bahwa dalam rangka mempermudah pelayanan publik maka diselenggarakan sistem pelayanan terpadu. Pada permendagri Nomor 24 Tahun 2006 dikeluarkan tentang pedoman penyelenggaraan terpadu satu pintu. Melalui Permendagri Nomor 4 tahun 2010 , pemerintah mengeluarkan pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

PATEN merupakan Inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan, non perizinan ditingkat kecamatan, terutama bagi kecamatan yang letaknya jauh dari kantor pemerintah/kabupaten/kota yang sulit menjangkau terhambat oleh beberapa faktor, seperti

1. akses jalan yang belum memadai,
2. faktor komunikasi (jaringan) yang sering terputus secara tiba-tiba, dan
3. faktor penerangan/listrik yang sering padam karena cuaca yang sering ekstrim dan berubah yang ada di desa.

PATEN memberi keuntungan dan dampak yang begitu positif, selain mempermudah dan kelancaran masyarakat mendapat pelayanan serta memberi nilai plus/positif di mata masyarakat tentang pemerintah daerah di desa. Kecamatan Tempursari dimana mayoritas masyarakatnya bertempat tinggal di daerah yang masih terpencil dan terhambat oleh akses jalan, jaringan internet (komunikasi) dan Sumber Daya Masyarakatnya masih banyak yang belum sadar akan pentingnya Administrasi Kependudukan karena tertinggal bahkan belum mengetahui informasi terkini tentang Administrasi Kependudukan. Maka Camat Tempursari pada tanggal 22 November 2021 mempunyai Inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan yang keberadaannya jauh dari kantor kecamatan Tempursari yang terhambat oleh beberapa faktor seperti akses jalan yang belum memadai, faktor komunikasi (jaringan) yang sering terputus secara tiba-tiba, dan faktor penerangan/listrik yang sering padam. Camat Tempursari pada tanggal 03 Januari 2023 resmi meluncurkan sebuah Inovasi dimana Inovasi tersebut akan mempermudah masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan. Peluncuran Program Inovasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yaitu JEMPOLAMATIR (Jemput Bola Akta Mati dan Lahir)

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecaatan Tempursari Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu bulan Januari s.d Desember 2024, maka dari Tujuan dan 2 Indikator Kinerja sasaran strategis serta 7 indikator kinerja sasaran program

tersebut:

dari 2 indikator sasaran strategis, 1 sasaran indikator mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan sudah mencapai 106% atau 117 % dari target Renstra sedangkan 1 indikator sasaran lainnya mencapai 94% atau 100 % dari target Renstra, sedangkan 7 indikator sasaran program 6 sasaran sudah mencapai 100 % dan 1 sasaran lainnya mencapai 85 %.

2. Berdasarkan Target dan capaian kinerja kecamatan tempursari menandakan bahwa pada progress yang signifikan terhadap pencapaian sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

- a. Tetap melakukan pengembangan potensi serta peningkatan kinerja pegawai dengan melakukan dan melaksanakan pemenuhan kinerja melalui Zoom dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara.
- b. Memfasilitasi serta mendukung program pemerintahan dalam pengembangan karir melalui tugas belajar , pelatihan dan diklat.
- c. Memfasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pelaporan desa (RKPDDes,APBDes dan LPPDes) tepat waktu .
- d. Fasilitasi perencanaan pembangunan desa melalui musrenbang desa ditingkat kecamatan
- e. Meningkatkan pelayanan adminduk secara gratis.

Lumajang, 10 Januari 2024

CAMAT TEMPURSARI



ARIF MUSTOFA,SAP

NIP 19750712 199703 1 002

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA MURNI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF MUSTOFA, SAP

Jabatan : Camat Tempursari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak kedua,



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,



ARIE MUSTOFA, SAP
NIP. 19730712 199703 1 002

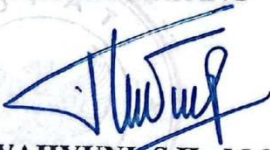
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TEMPURSARI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	94,12 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	85,71 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.637.711.042	DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 10.320.000	DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 136.009.700	DAU
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 13.100.000	DAU
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000	DAU
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 13.699.800	DAU
	1.818.040.542	

Lumajang, 10 Januari 2024

Pj.BUPATI LUMAJANG


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

KECAMATAN TEMPURSARI

ARIF MUSTOFA, SAP
NIP. 197507121997031002

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF MUSTOFA, SAP

Jabatan : CAMAT TEMPURSARI

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

 INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 02 September 2024
 Pihak Pertama


 ARIF MUSTOFA, SAP
 NIP. 19750712-199703 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
OPD : KECAMATAN TEMPURSARI**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77.27
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	65.00

	Program		Anggaran	
1.	Program Pen unjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.434.601.672	00
2.	Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	Rp.	1.200.000	00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	33.834.900	00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	2.700.000	00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000	00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp.	3.150.000	00
	JUMLAH	Rp.	1.482.686.572	00

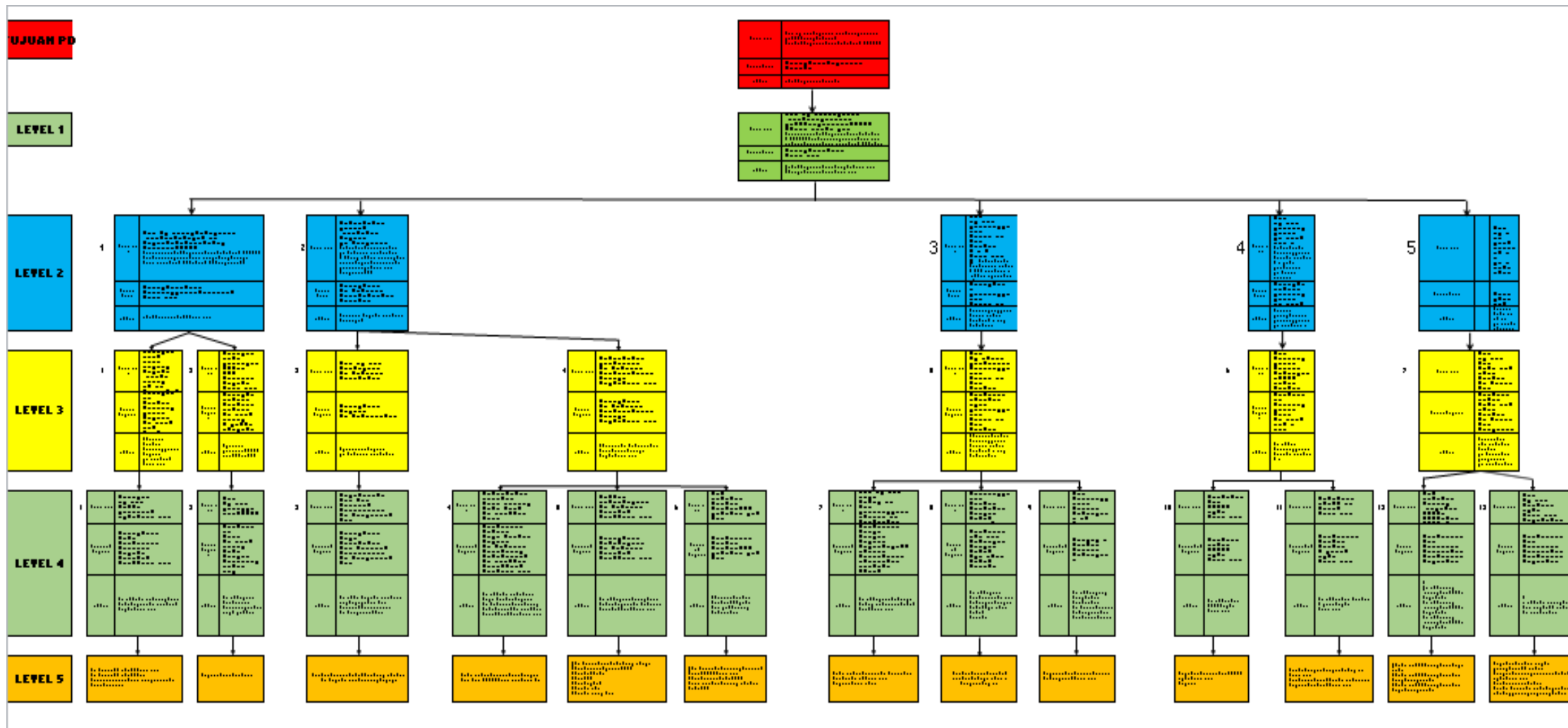
Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 02 September 2024
Pihak Pertama,


ARIF MUSTOFA, SAP
NIP. 19750712 199703 1 002

DOKUMEN POHON KINERJA



MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Tujuan
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran Strategis
1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA /SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gudung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Keluarga
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN TEMPURSARI
 Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No. 96 Tahun 2019

